

Hal : Permohonan Pengurangan /
Penghapusan Sanksi
Administrasi Piutang PBB-P2

Bantul,

Kepada
Yth. Bupati Bantul cq
Kepala Badan
Pengelolaan Keuangan
Pendapatan dan Aset
Daerah Kabupaten
Bantul
Di Bantul

Berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 105 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengurangan dan Penghapusan Sanksi Administratif Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, bersama ini kami :

1. Nama :
2. Alamat :
3. Kalurahan :
4. Kecamatan
5. Kabupaten/Kota*) :
6. Nomor Telepon :

Sebagai Wajib Pajak/Wajib Pajak Badan/Kuasa Wajib Pajak*), atas objek pajak :

1. Nomor Objek Pajak (NOP) :
2. Alamat Objek PBB-P2 :
3. Tahun PBB-P2 terhutang :
4. PBB-P2 terhutang dalam SPPT/ SKPD/ STPD*)
Pokok : Rp.
Denda : Rp.
Jumlah : Rp.

Dengan ini mengajukan permohonan pengurangan/penghapusan sanksi administrasi piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebesar(..... Persen). Dengan alasan :

Sebagai syarat permohonan kami lampirkan :

1. Fotocopy KTP
2. Fotocopy SPPT PBB-P2/Rekam pembayaran NOP/Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD)
3. Surat pernyataan kesanggupan membayar PBB P2 sesuai Keputusan

Demikian disampaikan untuk dapat dipertimbangkan dan atas perhatiannya, diucapkan terima kasih.

Hormat Kami
Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak*)

Keterangan

*) coret yang tidak perlu ()

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

1. Nama :
2. Alamat :
3. Kalurahan :
4. Kapanewon :
5. Kabupaten/ Kota*) :

Dengan ini menyatakan bahwa berkaitan dengan permohonan pengurangan/ penghapusan sanksi administratif Pajak Bumi dan Bangunan Perdsaan dan Perkotaan sanggup untuk membayar sesuai dengan keputusan atas permohonan yang saya ajukan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan apabila di kemudian hari saya mengingkari pernyataan ini, saya siap dituntut sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bantu1,

Yang menyatakan

Mcterai Rp.

10.000,-

()

